

Tingkat Keaktifan Komite Audit dan Manajemen Laba di Indonesia

Muhammad Agung Prabowo*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak. Penelitian ini menguji pengaruh tingkat keaktifan komite audit terhadap manajemen laba di Indonesia. Rerangka konseptual merujuk pada teori keagenan yang menyatakan bahwa tingkat keaktifan merupakan fondasi utama bagi komite audit untuk meningkatkan efektivitas monitoring. Teori ini memprediksi hubungan negatif antara tingkat keaktifan audit komite dengan manajemen laba. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2009 sampai 2014. Tingkat keaktifan mengacu pada jumlah rapat dan partisipasi anggota menghadiri rapat sedangkan manajemen laba diukur dengan rujukan pendekatan akrual. Analisa dilakukan dengan menggunakan regresi ordinary least square data panel. Hasil analisa menunjukkan bahwa frekuensi rapat berpengaruh secara insignifikan terhadap tingkat akrual, di lain pihak, tingkat partisipasi rapat berhubungan secara terbalik dengan akrual negatif. Hasil tersebut terbebas dari masalah sensitivitas interdependensi antar mekanisme governance internal. Namun demikian, temuan tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya masalah kontijensi terhadap pengukuran dan sifat sampel yang digunakan sebagai basis pengujian.

Kata kunci: Komite audit, frekuensi rapat, teori agensi, monitoring, manajemen laba perusahaan.

Abstract. This study tests the effect of audit committee activeness on earning management in Indonesia. The conceptual framework refers to agency theory which states that the level of activeness is the main foundation for audit committee to improve the effectiveness of monitoring. This theory predicts the negative relationship between audit committee activeness and earning management. The hypotheses are tested on the data collected from sampled manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in the 2009-2014 periods. The level of audit committee activeness refers to the numbers of meetings and participation from audit committee members, while earning management is measured by referring to accrual approach. The analysis is performed using ordinary least square regression on panel data. The analysis results show that the frequency of meeting has insignificant effect on accrual level, on the other side, the level of participation in the meeting has reverse relationship with negative accrual. The result is free from interdependence among internal governance mechanisms. However, the finding indicates the probability of contingency problem on the measurement and sample characteristic used as the basis in the analysis.

Keywords: Audit committee, meeting frequency, agency theory, monitoring, company earning management.

*Corresponding author. Email: muhammad.agung.prabowo.uns@gmail.com

Received: May 28th, 2018; Revision: May 30th, 2018; Accepted: Juli 15th, 2018

Print ISSN: 1412-1700; Online ISSN: 2089-7928. DOI: <http://dx.doi.org/10.12695/jmt.2017.17.2.2>

Copyright©2018. Published by Unit Research and Knowledge, School of Business and Management - Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB)

Pendahuluan

Penelitian ini menguji pengaruh tingkat keaktifan komite audit terhadap manajemen laba di Indonesia. Dari perspektif hubungan keagenan, keaktifan merupakan sebuah properti yang secara potensial dapat menjaga *required condition* bagi mekanisme *market for corporate control* untuk berjalan secara efektif (Ghafran & O'Sullivan, 2013). Tidaklah mengherankan jika tingkat keaktifan komite digunakan sebagai standar *governance* yang diadopsi oleh beberapa negara (Adams & Ferreira, 2012). Premis dasar yang digunakan sebagai rujukan adalah tingkat keaktifan akan meningkatkan efektivitas komite audit yang berujung pada peningkatan kualitas informasi yang dihasilkan perusahaan.

Penelitian empiris menemukan keberadaan faktor kontijensi dalam hubungan antara mekanisme *governance* dengan *outcome* organisasi (Black, Carvalho & Gorga, 2012; Munisi & Randøy, 2013). Satu kelompok riset mendukung sifat komplementer antara *governance* tingkat perusahaan dengan *governance* tingkat negara. Pendapat ini didasarkan pada pengujian yang menghasilkan gambaran bahwa manfaat *governance* tingkat perusahaan lebih bisa diobservasi di negara dengan tingkat perlindungan investor yang rendah (Chen, Chen & Wei, 2009; Francis, Hasan, Song, & Waisman, 2013).

Kelompok lain meyakini sifat substitusi karena menemukan bahwa hubungan antara mekanisme *governance* tingkat perusahaan dengan *outcome* organisasi hanya dapat ditemukan pada negara yang mempunyai perlindungan investor yang kuat (Leuz, Nanda & Wysocki, 2003; González & García-Meca, 2014; Persakis & Iatridis, 2016). Kontradiksi ini mempunyai implikasi bahwa pengaruh keaktifan komite audit, sebagai salah satu mekanisme *governance*, terhadap tingkat kualitas laporan keuangan di Indonesia, dengan perlindungan investor yang lemah, masih menjadi pertanyaan empiris yang terbuka. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang membahas masalah tersebut dan, dengan demikian, paper ini dimaksudkan untuk mengisi celah penelitian tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur *governance* dalam beberapa area. Pertama, penelitian terdahulu hanya mengandalkan frekuensi rapat sebagai ukuran tingkat keaktifan. Sesuai observasi Rhoades, Rechner dan Sundaramurthy (2000) hubungan antara mekanisme *governance* dengan suatu *outcome* organisasi menunjukkan sensitivitas yang signifikan terhadap masalah pengukuran. Oleh karena itu, penelitian ini juga merujuk pada partisipasi rapat sebagai salah satu dimensi tingkat keaktifan komite audit. Ke dua, penelitian ini juga mengakunkan interdependensi antar mekanisme *governance* internal karena terdapat kemungkinan bahwa mekanisme *governance* bersifat substitusi atau komplementer (Agrawal & Knoeber, 1996; Armstrong, Blouin, Jagolinzer, & Larcker, 2015).

Dewan komisaris merupakan sebuah organ perusahaan yang mempunyai tugas utama melakukan monitoring atas keputusan yang dibuat oleh manajemen. Walaupun secara individual menghasilkan temuan yang jauh dari konsensus, resume karya empiris mengkonfirmasi bahwa monitoring dapat menghasilkan *outcome* organisasi yang lebih baik (Rhoades, Rechner & Sundaramurthy, 2000). Sesuai dengan kelaziman perspektif keagenan, dikatakan bahwa fokus monitoring terletak pada fungsi pengawasan (Dalton, Daily, Ellstrand, & Johnson, 1998; Dalton, Daily, Johnson, & Ellstrand, 1999).

Namun demikian, sebenarnya monitoring merujuk pada semua tindakan yang melahirkan nilai tambah dan, dengan demikian, meningkatkan kinerja perusahaan (Maug, 1998). Premis ini mempunyai implikasi bahwa cakupan tugas dewan dalam melakukan monitoring menjadi amat luas. Secara metodologis, hal ini akan membuat hubungan empiris antara efektivitas dewan dengan *outcome* spesifik menjadi sulit untuk terobservasi. Oleh karena itu, pengaruh mekanisme monitoring terhadap kinerja spesifik akan lebih jelas terlihat jika merujuk pada komite yang ada dalam dewan komisaris yang bertugas secara khusus pada bidang tertentu (Klein, 2002).

Eksistensi dan pembentukan jenis komite didasarkan pada cakupan tugas yang dibebankan kepada dewan komisaris, baik karena permintaan peraturan maupun karena tekanan pasar. Jiraporn, Singh, dan Lee (2009) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dewan ditentukan oleh kinerja komite. Klaim ini didasarkan pada perspektif dari model agregasi yang mengasumsikan bahwa kinerja dewan merupakan akumulasi dari kinerja semua komite yang ada dalam dewan (Chen & Zhou, 2007; Mohid Rahmat, Mohd Iskandar & Mohd Saleh, 2009; Barua, Rama & Sharma, 2010).

Dengan kata lain, komite dianggap sama dan sebangun dengan dewan walaupun terdapat perbedaan pada skala dan ruang lingkup tanggungjawab. Oleh karena itu efektivitas dewan dalam mempengaruhi suatu *outcome* khusus ditentukan oleh efektivitas komite yang bertugas pada bidang tersebut, yang secara metodologis akan memungkinkan untuk dilakukan pengujian yang lebih jernih. Secara umum komite yang ada dalam dewan mencakup komite keuangan dan investasi, eksekutif dan nominasi, remunerasi, investasi, resiko, dan audit, walaupun terdapat variasi antar perusahaan dan antar negara.

Secara substantif, salah satu tugas utama komite audit adalah menjamin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen bebas dari kesalahan yang dapat menyesatkan pemakai laporan (DeZoort, Hermanson, Archambeault, & Reed, 2002). Hal ini mencakup pengawasan terhadap proses dan sistim penyusunan laporan, penelaahan atas kebutuhan dan pengembangan internal audit, sampai dengan penunjukan dan penentuan *fee* auditor (Vafeas & Waagelein, 2007; Zhang, Zhou & Zhou, 2007; Ghafran & O'Sullivan, 2013). Walaupun terdapat variasi dalam strategi maupun rute yang diterapkan untuk menunaikan tanggung jawab, literatur keagenan mengasumsikan bahwa efektivitas komite ditentukan oleh karakteristik agregat anggota komite (Samaha, Khlif & Hussainey, 2015).

Literatur menyatakan bahwa karakteristik individu dapat merujuk pada independensi, latar belakang dan tingkat pendidikan, kepemimpinan, gender, dan tenure (Aldamen, Duncan, Kelly, McNamara, & Nagel, 2012; Min & Verhoeven, 2013; Schwartz-Ziv & Weisbach, 2013) walaupun cakupan tersebut terus berkembang. Sebagai contoh, studi empiris *governance* telah menelaah karakteristik yang meliputi independensi dan latar belakang pendidikan (Raghuandan & Rama, 2003; Raghuandan & Rama, 2007) serta ukuran dan latar belakang keahlian keuangan (Goh, 2009). Namun demikian, karakteristik tersebut hanya mewakili kapasitas individual alat monitoring dan dianggap gagal memotret pelaksanaan tugas dalam rangka menunaikan tanggungjawab. Oleh karena itu, paper seminal dari Millstein dan MacAvoy (1998) menambahkan dimensi keaktifan karena variable ini dianggap dapat mewakili tingkat pelaksanaan kegiatan mekanisme *governance* internal. Prediksi yang diajukan adalah bahwa tingkat keaktifan mekanisme monitoring akan mempengaruhi kinerja organisasi secara searah.

Kelaziman yang berlaku di dalam riset empiris yang menguji tingkat keaktifan komite audit menggunakan ukuran rapat sebagai surogasi (Méndez & García, 2007; Giulio, 2011 ; Basil, 2012; Feng et al., 2012). Alasan utama penggunaan rapat sebagai proksi ini didasarkan pada kepraktisan dari sisi metodologi. Secara khusus dikemukakan bahwa rapat merupakan cerminan tingkat upaya komite audit, yang dapat diidentifikasi dan diukur secara langsung, dalam memenuhi fungsi monitoring (Stewart & Munro, 2007; Hoque, Islam & Azam, 2013). Oleh karena itu, frekuensi rapat dianggap berpengaruh secara positif terhadap efektivitas pelaksanaan tugas komite audit dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Arti penting rapat dapat ditinjau dari argumen kapabilitas anggota komite dan argumen proses pengambilan keputusan strategis. Dari argumen kapabilitas, merupakan media bagi anggota komite untuk melakukan diskusi dan meminta informasi secara langsung kepada manajemen (Adams & Ferreira, 2008).

Oleh karena itu perspektif kapabilitas berargumen bahwa rapat merupakan mekanisme untuk meningkatkan kelancaran saluran informasi antar anggota komite dan antara anggota dengan manajemen puncak. Dengan kata lain, rapat merupakan sarana bagi komite untuk menjadi lebih *well informed*. Argumen ini didasarkan pada premis yang menyatakan bahwa properti informasi merupakan *necessary condition* bagi mekanisme *governance* untuk dapat bekerja dengan baik. Sebagaimana yang dinyatakan oleh literatur keagenan, mekanisme monitoring hanya dapat berjalan secara efektif jika mempunyai sifat independent dan mempunyai cukup informasi (Adams & Ferreira, 2007; Adams, Hermalin & Weisbach, 2008). Berdasarkan premis ini maka dapat dikatakan bahwa rapat dapat dianggap sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan efektivitas komite audit dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen.

Perspektif proses pengambilan keputusan strategis merujuk pada eksistensi sifat kolegal kepemimpinan yang melekat pada struktur organisasi perusahaan. Secara rinci perspektif proses mengklaim bahwa pengambilan keputusan, secara lazim, dilakukan pada saat rapat jajaran puncak perusahaan (Chou, Chung & Yin, 2013). Oleh karena itu perspektif ini menyatakan bahwa komite audit dapat melakukan pengambilan keputusan strategis pada rapat yang diadakan, yang selanjutnya akan mempengaruhi keputusan manajerial. Dengan kata lain, rapat merupakan sebuah media yang menentukan efektivitas komite audit dalam menjalankan fungsi monitoring. Bahkan secara sarkastik dinyatakan bahwa kegagalan mencapai jumlah rapat pada tingkat yang semestinya hanya akan menjadikan alat monitoring sebagai sebuah stempel yang melegitimasi keputusan manajemen (Xie, Davidson & DaDalt, 2003). Dari dua perspektif ini terlihat bahwa rapat diprediksi dapat mempengaruhi efektivitas komite dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen.

Dalam pelaporan keuangan, perilaku oportunistik manajemen dapat tercermin dalam tingkat manajemen laba yang meningkatkan resiko informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Beberapa karya telah menelaah pengaruh jumlah rapat terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan menemukan bahwa rapat dapat menurunkan *discretionary accruals* (García, Barbadillo & Pérez, 2012; Habbash, Sindezingue & Salama, 2013), kecurangan pelaporan akuntansi dan penyajian kembali (Abbott, Parker & Peters, 2004; Carver, 2014), dan *overstatement* laba (Sultana, 2015). Penelitian lain menggunakan rute berbeda untuk menguji pengaruh rapat terhadap pelaporan keuangan dan menemukan bahwa tingkat rapat dapat mengurangi resiko audit (Stewart & Munro, 2007), meningkatkan permintaan (demand) atas kualitas audit (Goodwin & Stewart & Kent, 2006), memfasilitasi auditor dalam mendeteksi salah saji material (Keune & Johnstone, 2012), serta menurunkan konflik keagenan yang timbul dari struktur kepemilikan (Cai et al., 2015). Rute lain ditempuh oleh Anderson, Mansi dan Reeb (2004) yang menguji pengaruh antara tingkat rapat dengan biaya hutang. Mereka menemukan bahwa perusahaan dengan komite audit yang melakukan rapat pada frekuensi yang tinggi mempunyai tingkat biaya hutang yang rendah. Lebih lanjut, mereka menginterpretasikan bahwa tingkat biaya hutang mencerminkan resiko informasi dalam laporan keuangan.

Dari tinjauan literatur terlihat bahwa tingkat keaktifan komite audit dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui proses pelaporan keuangan, penjaminan kualitas audit, dan pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan manajemen laba sebagai proksi kualitas laporan keuangan dan mengajukan prediksi bahwa semakin tinggi keaktifan komite audit maka tingkat manajemen laba akan semakin rendah. Dengan demikian, secara formal hipotesis yang diajukan adalah:
H1: tingkat keaktifan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba secara negatif

Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan sampel yang terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang tahun 2009 sampai dengan 2014. Data variabel dependen maupun independen bersumber dari laporan tahunan. Perusahaan manufaktur mengacu pada kode dua digit BEI dari kode 30 sampai dengan kode 50.

Sampel awal terdiri dari 812 perusahaan-tahun yang kemudian dikurangi 65 perusahaan-tahun karena ketiadaan laporan tahunan sebagai sumber data. Prosedur selanjutnya adalah menghapus sebanyak 322 observasi yang tidak menyediakan data mengenai jumlah rapat dan partisipasi rapat komite audit. Secara rinci prosedur pengambilan sampel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.

Prosedur Pengambilan Sampel

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Jumlah perusahaan	129	131	133	136	139	144	812
Minus:							
Annual Report tidak tersedia	36	17	9	3	0	0	65
Data rapat tidak tersedia	67	64	53	47	46	45	322
Jumlah sampel	26	50	71	86	93	99	425

Seperti yang ditunjukkan pada tabel, sampel final terbentuk dari data panel. Selain menjelaskan prosedur pengambilan sampel, Tabel 1 juga menggambarkan beberapa hal yang dapat menjadi catatan bagi riset yang menguji hubungan *governance* dengan *outcome* organisasi. Tabel menunjukkan bahwa terjadi penurunan prosentase ketiadaan *annual report* dengan tren yang berbanding lurus dengan tahun. Kemungkinan, hal ini dapat dilihat sebagai buah dari perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan repository data menjadi lebih baik. Data juga memperlihatkan bahwa persentase ketersediaan data mengenai jumlah dan partisipasi rapat menunjukkan pola yang meningkat. Jika digabungkan dengan tren ketersediaan laporan tahunan, hal ini setidaknya dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan komitmen mengenai transparansi dari para pelaku pasar modal di Indonesia.

Variable dependen adalah tingkat manajemen laba yang diukur dengan menggunakan nilai *discretionary accruals* (DAC). Variabel independent utama adalah tingkat rapat komite audit. Model memasukkan dua kelompok variabel kontrol yang terdiri dari karakteristik mekanisme *governance* internal dan karakteristik perusahaan.

Mekanisme *governance* internal meliputi ukuran komite audit, independensi dewan komisaris, ukuran kantor auditor, dan kepemilikan publik. Sedangkan karakteristik perusahaan mencakup hutang bank, kerugian tahun lalu, dan ukuran perusahaan. Model yang diajukan disajikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$DAC_{it} = +1 MEET_{it} + 2 BSZE_{it} + 3 BIDP_{it} + 4 OWN_{it} + 5 ASST_{it} + 6 LEV_{it} + 7 ROA_{it-1} + 8 CFO_{it-1} + \dots (1)$$

Simbol *i* dan *t* masing-masing mewakili perusahaan dan tahun. Penentuan nilai DAC mengacu pada Jones (1991) yang diklaim merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba (Guay et al., 1996; Dechow et al., 1995). Penelitian ini memasukkan faktor *adjustment* industri terhadap model Jones (1991) seperti yang diterapkan oleh Dechow, Sloan dan Sweeney (1995). *Adjustment* industri untuk nilai DAC merujuk pada klasifikasi 2 digit kelompok industri Bursa Efek Indonesia yang mencakup kode industri 30, 40, dan 50. Nilai *discretionary accruals* didapatkan dari persamaan:

$$DAC_{it} = (TAC_{it} / A_{it-1}) - NDA_{it} \dots (2)$$

Pada persamaan (2), DAC_{it} merupakan *discretionary accruals* perusahaan i pada periode t , TAC_{it} merupakan total accruals perusahaan i pada periode t , A_{t-1} adalah aset total untuk sampel perusahaan i pada tahun $t-1$, dan NDA_{it} merupakan skor non discretionary accruals perusahaan i pada periode t . Nilai TAC_{it} didasarkan pada nilai accrual populasi industri sebagai benchmark, dengan formula sebagai berikut:

$$(TAC_{it}/A_{it-1}) = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) + \epsilon_{it} \dots\dots\dots (3)$$

Pada persamaan (3), ΔREV_{it} adalah perubahan *revenue* perusahaan i dari tahun $t-1$ ke tahun t , dan PPE_{it} adalah aktiva tetap (*gross property plant and equipment*) perusahaan i tahun t . Nilai non *discretionary accruals* merupakan derivasi dari nilai total accruals dengan metode *fitted* koefisien nilai $\beta_1 \dots \beta_n$ yang didapatkan dari persamaan (3) dengan formula sebagai berikut: $NDA_{it} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 ([\Delta REV_{it} + \Delta REC_{it}]/A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) \dots\dots\dots (4)$

Pengukuran akrual dilakukan dengan merujuk pada pendekatan *cash flow* (income sebelum items dikurangi arus kas dari operasi) yang memungkinkan koefisien α dan β persamaan (3) dan (4) terbebas dari bias yang timbul sebagai akibat kejadian non-artikulasi yang melekat pada pendekatan neraca (Hribar & Collins, 2002).

Rapat (MEET) komite audit diukur dengan menggunakan jumlah rapat yang diagendakan setiap tahun. Hal ini ditempuh karena riset yang menyelidiki pengaruh jumlah rapat terhadap jumlah organisasi didasarkan pada asumsi bahwa anggota komite menghadiri rapat yang diadakan secara penuh. Dengan kata lain, variasi tingkat kehadiran antar anggota dan antar rapat diasumsikan sama dengan nol. Namun demikian, asumsi ini dipertanyakan karena terdapat kemungkinan variasi tingkat partisipasi antar anggota (Chou, Chung & Yin, 2013). Oleh karena itu, diusulkan agar digunakan tingkat kehadiran anggota dalam rapat (Adams & Ferreira, 2012; Lin, Yeh & Yang, 2014).

Berdasarkan pendapat ini, maka analisa diperluas dengan menggantikan jumlah rapat pada persamaan dengan tingkat partisipasi mengikuti rapat. Ukuran tingkat partisipasi adalah rata-rata kehadiran seluruh anggota komite audit suatu perusahaan dalam satu tahun (jumlah anggota komite dikalikan kehadiran rapat masing-masing anggota dibagi jumlah anggota komite dikalikan jumlah rapat).

Model memasukkan karakteristik *governance* dan karakteristik perusahaan sebagai variabel kontrol. Ukuran dewan komisaris (BSIZE) adalah jumlah anggota komisaris. Proporsi komisaris independen (BIDP) adalah jumlah anggota komisaris independen dibagi jumlah anggota komisaris. Kepemilikan pemegang saham mayoritas (OWN) adalah jumlah saham yang dimiliki oleh 10 pemegang saham terbesar selain pemegang saham publik. Ukuran perusahaan (ASSET) adalah log 10 aktiva total. Hutang bank (LEV) merupakan saldo hutang bank dibagi total asset. Tingkat profitabilitas tahun lalu (ROA) merupakan laba setelah bunga dan pajak dibagi asset, sedangkan CFO adalah nilai tahun lalu arus kas dari operasi.

Penjelasan rangkuman variabel yaitu:

- DACAB* Discretionary accruals industry-adjusted merujuk pada model Jones (1991) dengan pendekatan neraca
- MEET* Tingkat rapat: (1) jumlah rapat yang diagendakan setiap tahun (2) rata-rata tingkat kehadiran anggota komite mengikuti rapat
- BSZE* Ukuran dewan komisaris: jumlah anggota komisaris.
- BIDP* Proporsi komisaris independen: jumlah anggota komisaris independen dibagi jumlah anggota komisaris
- OWN* Kepemilikan pemegang saham mayoritas: jumlah saham yang dimiliki oleh 10 pemegang saham terbesar selain pemegang saham publik
- ASST* Ukuran perusahaan: log 10 aktiva total
- LEV* Hutang bank: saldo hutang bank dibagi total asset
- ROA* Tingkat profitabilitas tahun lalu: laba setelah biaya bunga dan pajak dibagi asset
- CFO* arus kas dari operasi

Hasil dan Pembahasan

Tabel 3 menyajikan statistika deskriptif semua variabel. Nilai rata-rata DAC (*signed discretionary accruals*) adalah -.009 dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar -0.551 dan 0.436. Statistik ini didapatkan sebelum dilakukan winsorisasi untuk menggambarkan karakteristik awal earnings management di perusahaan sampel. Statistik menunjukkan bahwa proporsi sampel yang melakukan earnings management positif dapat dikatakan seimbang dengan proporsi perusahaan manufaktur yang melakukan *earnings management* negatif. Tidak mengherankan jika sampel mempunyai standar deviasi yang jauh lebih tinggi daripada nilai rata-rata.

Oleh karena itu, penelitian ini melakukan pencoretan (*winsorized*) semua nilai data yang termasuk pada kategori 1 persen terbawah dan teratas dihilangkan untuk menghindari outlier. Setelah dilakukan winsorisasi, jumlah N untuk masing-masing variabel bervariasi antar variabel yang menunjukkan bahwa sampel bersifat *unbalanced*. Statistik untuk *absolute discretionary accruals* (DACAB) menunjukkan perubahan sebaran yang signifikan (Min = 0.000, Max = 0.194, rata-rata = 0.054, standar deviasi = 0.050) dibandingkan sampel awal.

Tabel 2.
Statistika Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	S.Dev
DAC	425	-0,551	0,436	-0,009	0,102
DACAB	357	0,000	0,194	0,054	0,050
FREK	403	1,000	14,000	5,370	3,038
PARTS	419	0,500	1,000	0,949	0,094
BSZE	425	2,000	13,000	4,362	1,842
BIDP	425	0,200	1,000	0,402	0,124
OWN	398	0,300	99,02	0,744	0,163
ASST	425	4,120	8,370	6,221	0,714
LEV	386	0,040	0,980	0,439	0,190
ROA	394	-0,140	0,350	0,108	0,090
CFO	399	-0,200	0,380	0,080	0,101

Frekuensi rapat menunjukkan rentang yang tinggi (min=1 max=14). walaupun masih dalam batas distribusi normal (rata-rata= 5,370, standar deviasi= 3,038). Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata komite audit perusahaan melakukan rapat setiap 9,6 minggu sekali. Tentu saja fitur ini memberikan indikasi bahwa tingkat aktivitas komite audit di Indonesia masih rendah. Nilai minimum tingkat kehadiran rapat adalah 0,500 sedangkan tingkat partisipasi maksimum adalah 1.000 yang memperlihatkan bahwa tingkat kehadiran rapat masih menjadi isu yang harus dipecahkan pada sebagian perusahaan. Namun demikian,

secara rata-rata partisipasi rapat berada pada tingkat 95% dengan standar penyimpangan yang kecil (0,094). Rata-rata dewan komisaris mempunyai 4,3 anggota dengan standar deviasi 1,8. Dewan komisaris yang paling kecil mempunyai anggota 2 orang sedangkan yang terbesar memiliki 13 anggota. Proporsi anggota komisaris independen rata-rata berkisar pada tingkat 40% dengan standar deviasi 12% yang mengindikasikan bahwa dewan komisaris di Indonesia didominasi oleh kalangan non-independen. Pada sebagian perusahaan, tingkat kepemilikan 10 pemegang saham terbesar mencapai 99% sedangkan pada

bagian lain menunjukkan kepemilikan yang terdispersi (min = 30%). Namun jika dilihat dari nilai rata-rata 74% dan standar deviasi 16%, kepemilikan perusahaan di Indonesia menunjukkan struktur yang terkonsentrasi.

Walaupun masih dalam batas distribusi yang dapat diterima (rata-rata = 6,22 standar deviasi = 0.71), ukuran perusahaan manufaktur menunjukkan rentang yang lebar (min = 4,12, maks=8,37). Statistik menunjukkan bahwa perusahaan terbesar mempunyai ukuran 10.000 kali lipat perusahaan terkecil. Rata-rata pendanaan 49% assets perusahaan manufaktur bersumber dari hutang bank dengan nilai maksimum dan minimum sebesar masing-masing 0,4% dan 44%. Dari angka rerata ini dapat disimpulkan bahwa pendanaan perusahaan lebih mengandalkan pada hutang dibandingkan dengan pendanaan internal.

Rerata tingkat profitabilitas relatif terhadap asset berada pada kisaran 11% yang lebih tinggi dari tingkat bunga deposito. Hal ini mencerminkan operasi perusahaan dapat menghasilkan tingkat profitabilitas yang sehat karena mempunyai margin diatas tingkat pengembalian bebas resiko. Secara ringkas, statistika deskriptif menggambarkan bahwa perusahaan manufaktur mempunyai komite audit yang kurang aktif, dewan komisaris yang didominasi oleh komisaris non-independen, kepemilikan yang terkonsentrasi, dan variasi ukuran perusahaan pada rentang yang lebar.

Tabel 3 memaparkan korelasi antar variabel. Koefisien korelasi yang terbesar adalah sebesar 0,59. Angka ini jauh lebih kecil dari 0,80 sebagai rule of thumb terjadinya masalah multikolinearitas (Gujarati, 1992). Oleh karena itu, model yang akan diuji dapat diyakini terbebas dari masalah multikolinearity.

Tabel 3.
Korelasi

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 DACAB	1,00								
2 FREK	-0,09 c	1,00							
3 PARTS	-0,02	-0,12 b	1,00						
4 BSZE	-0,08	0,11 b	-0,17 a	1,00					
5 BIDP	-0,06	0,20 a	-0,01	-0,10 b	1,00				
6 OWN	-0,10 c	-0,06	-0,13 b	-0,09 c	-0,03	1,00			
7 ASST	-0,16 a	0,20 a	-0,08 c	0,55 a	0,05	0,15 a	1,00		
8 LEV	0,09	-0,02	0,06	0,00	0,11 b	-0,04	0,16 a	1,00	
9 ROA	-0,10 c	0,03	-0,07	0,08	-0,05	0,14 b	0,05	-0,40 a	1,00
10 CFO	-0,04	0,07	-0,05	0,10 b	0,01	0,03	0,14 b	-0,35 a	0,59 a

Tanda a, b, c menunjukkan signifikansi masing -masing pada tingkat 1%, 5%, dan 10%. Penjelasan mengenai simbol variabel disajikan pada Appendix .

Multivariate

Hasil pengujian persamaan (1) disajikan pada Tabel 4 sampai Tabel 7. Semua pengujian dilakukan dengan memasukkan efek tetap industry maupun tahun. Pada Tabel 4 variabel dependen adalah nilai *absolute discretionary accruals*. Nilai Wald- χ^2 dan tingkat Prob > χ^2 kolom 1 masing –masing adalah 17,56 dan 0,02 dan kolom 2 sebesar 22,33 dan 0,00.

Hal ini mengindikasikan bahwa model secara statistik dan ekonomi dapat diterima. Pada kolom 1, tingkat rapat diukur dengan berdasarkan jumlah rapat yang diagendakan per tahun. Model mampu menjelaskan 6% variasi nilai *absolute discretionary accruals*. Jumlah rapat secara negatif mempengaruhi accrual namun secara statistik dan ekonomik insignificant.

Pada kolom 2 rapat diukur dengan menggunakan rerata tingkat partisipasi anggota. Sama seperti hasil sebelumnya, pengaruh rapat terhadap akrual adalah insignifikan. Namun demikian, penggunaan alat ukur yang berbeda menyebabkan perubahan nilai R^2 yang meningkat menjadi 8%. Kenaikan R^2 ini dapat diartikan bahwa pengukuran tingkat kehadiran rapat anggota komite lebih mampu mengukur tingkat keaktifan komite daripada jumlah rapat yang diagendakan. Temuan ini merupakan indikasi bahwa pengaruh tingkat keaktifan komite audit terhadap tingkat *discretionary accruals* mempunyai sifat sensitif terhadap alat pengukuran variabel. Karakteristik *governance* perusahaan (ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan struktur kepemilikan) tidak mempengaruhi akrual.

Ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap akrual pada tingkat signifikansi 5% (kolom 1) dan 1% (kolom 2). Penjelasan yang mungkin dari hal ini adalah perusahaan yang berukuran besar lebih menarik perhatian para partisipan pasar sehingga membentuk pengawasan eksternal yang lebih tajam. Hal ini menyebabkan perusahaan berupaya menghindari akrual karena adanya kemungkinan penalti pasar. Tingkat hutang bank berpengaruh positif terhadap akrual pada tingkat 5% (kolom 1) dan 10% (kolom 2). *Debt covenant hypothesis* mengemukakan bahwa akrual positif dilakukan oleh perusahaan manufaktur untuk menghindari pelanggaran terhadap kontrak dan jaminan hutang. Tingkat pengembalian asset dan arus kas dari operasi tidak mempengaruhi akrual.

Tabel 4.
Regresi Pengaruh Rapat terhadap *Absolute Discretionary Accruals*

		1	2
MEET	Coef.	0,00	-0.03
	z-value	-0,27	-1.02
BSZE	Coef.	0,00	0.00
	z-value	0,18	0.68
BIDP	Coef.	-0,01	-0.02
	z-value	-0,54	-0.73
OWN	Coef.	-0,02	-0.02
	z-value	-1,10	-0.89
ASST	Coef.	-0,01 b	-0.02 a
	z-value	-2,46	-3.03
LEV	Coef.	0,04 b	0.05 a
	z-value	2,09	2.77
ROA	Coef.	-0,03	0.02
	z-value	-0,81	0.38
CFO	Coef.	0,02	-0.02
	z-value	0,38	-0.60
konstanta		Ya	Ya
Efek tetap - industry		Ya	Ya
Efek tetap - tahun		Ya	Ya
R^2 - overall		0,06	0.08
Wald χ^2		17,56	22.33
Prob > χ^2		0,02	0.00

Tanda a, b, c menunjukkan signifikansi masing-masing pada tingkat 1%, 5%, dan 10%. Pada kolom 1, rapat diukur dengan merujuk pada jumlah rapat sedangkan pada kolom 2 rapat mengacu pada tingkat partisipasi anggota komite audit. Penjelasan mengenai simbol variabel disajikan pada Appendix.

Pada Tabel 5, persamaan (1) direplikasi dengan menggunakan akrual positif sebagai variabel dependen. Seperti pengujian sebelumnya, nilai Wald- χ^2 dan tingkat Prob > χ^2 yang tinggi mengindikasikan bahwa model dapat diterima secara statistik. Model mampu menjelaskan 44 % (kolom 1 dan 2) perbedaan akrual antar observasi. Dibandingkan dengan tabel sebelumnya, baik nilai Wald- χ^2 maupun R^2 menjadi meningkat tajam ketika pengujian dilakukan dengan menggunakan sub-sampel berupa perusahaan yang melakukan akrual positif. Sebagai contoh, pada Tabel 4 kolom 1 nilai R^2 adalah 5% sedangkan Tabel 5 kolom 1 nilai R^2 berubah menjadi 22%.

Pada kolom 2 Tabel 1 dan Tabel 2, nilai R^2 mengalami kenaikan yang substansial dari 8% menjadi 21%. Nilai Wald- χ^2 meningkat dari masing-masing 17,6 (Tabel 4 kolom 1) dan 22,3 (Tabel 4 kolom 2) menjadi 43,8 (Tabel 5 kolom 1) dan 43,7 (Tabel 5 kolom 2). Perubahan ini memberikan pertanda bahwa pengaruh tingkat keaktifan komite audit terhadap akrual pada suatu sampel dengan sifat tertentu kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda pada sampel lain dengan sifat yang berbeda. Dengan kata lain, kekuatan pengaruh tingkat keaktifan komite audit dengan mempunyai sifat kontijensi terhadap sifat populasi yang digunakan sebagai dasar pengujian.

Tabel 5.
Regresi Pengaruh Rapat terhadap Positive Discretionary Accruals

		1	2
MEET	Coef.	0,00	0,02
	z-value	-0,01	0,43
BSZE	Coef.	0,00	0,00
	z-value	-0,23	-0,20
BIDP	Coef.	-0,01	-0,02
	z-value	-0,34	-0,44
OWN	Coef.	0,00	0,00
	z-value	0,02	0,02
ASST	Coef.	0,00	0,00
	z-value	-0,26	-0,49
LEV	Coef.	0,03	0,03
	z-value	1,13	1,28
ROA	Coef.	0,25 a	0,25 a
	z-value	4,13	4,13
CFO	Coef.	-0,35 a	-0,33 a
	z-value	-5,87	-5,77
konstanta		Ya	Ya
Efek tetap - industry		Ya	Ya
Efek tetap - tahun		Ya	Ya
R ² - overall		0,22	0,21
Wald chi2		43,76	43,67
Prob > chi2		0,00	0,00

Tanda a, b, c menunjukkan signifikansi masing-masing pada tingkat 1%, 5%, dan 10%. Pada kolom 1, rapat diukur dengan merujuk pada jumlah rapat sedangkan pada kolom 2 rapat mengacu pada tingkat partisipasi anggota komite audit. Penjelasan mengenai simbol variabel disajikan pada Appendix.

Hasil analisa pada kolom 1 gagal menemukan pengaruh signifikan tingkat frekuensi rapat terhadap akrual positif. Hasil yang sama juga ditunjukkan kolom 2 ketika tingkat keaktifan komite audit diukur dengan menggunakan rata-rata tingkat kehadiran rapat anggota komite. Dibandingkan Tabel 4, pengaruh ukuran perusahaan dan tingkat hutang bank menjadi hilang, bahkan jika menggunakan tingkat marginal. Tingkat profitabilitas tahun lalu mempengaruhi akrual pada tingkat signifikansi 1% yang menandakan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun lalu cenderung untuk melakukan akrual positif. Variasi senilai 1 standar deviasi tingkat profitabilitas tahun lalu dapat menyebabkan peningkatan akrual sebesar 2 poin relatif terhadap tingkat akrual industri. Arus kas dari operasi tahun lalu juga menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik dan ekonomis.

Pengujian selanjutnya adalah dengan mengubah variabel dependen pada persamaan (1) menjadi akrual negatif (*income decreasing accruals*). Hasil pengujian dipresentasikan pada Tabel 6. Nilai Wald- χ^2 pada kolom 1 dan 2 masing-masing sebesar 54 dan 53. Angka tersebut memberikan justifikasi bahwa secara statistik model yang digunakan memadai untuk diterima. Semua model mampu menjelaskan 29% pola perubahan akrual negatif. Dibandingkan dengan Tabel 4 dan 5, hasil yang disajikan pada Tabel 6 juga menunjukkan pola peningkatan Wald- χ^2 dan R^2 yang memperlihatkan kekuatan model dalam menjelaskan variasi akrual negatif lebih tinggi daripada kekuatan dalam menjelaskan variasi akrual absolut dan akrual positif. Hal ini memberikan konfirmasi bahwa kekuatan model dalam meramalkan pengaruh tingkat keaktifan komite audit terhadap akrual bersifat kontijensi terhadap sifat populasi.

Tabel 6.
Regresi Pengaruh Rapat terhadap Negative Discretionary Accruals

		1	2
MEET	Coef.	0,00	-0,08 b
	z-value	-0,50	-2,05
BSZE	Coef.	0,00	0,00
	z-value	0,35	0,52
BIDP	Coef.	-0,02	-0,03
	z-value	-0,50	-1,04
OWN	Coef.	0,00	-0,01
	z-value	-0,04	-0,29
ASST	Coef.	-0,02 a	-0,03 a
	z-value	-3,29	-4,12
LEV	Coef.	0,03	0,05 b
	z-value	1,48	2,12
ROA	Coef.	-0,32 a	-0,25 a
	z-value	-5,30	-4,24
CFO	Coef.	0,35 a	0,29 a
	z-value	5,72	4,92
konstanta		Ya	Ya
Efek tetap - industry		Ya	Ya
Efek tetap - tahun		Ya	Ya
R ² - overall		0,29	0,29
Wald chi ²		53,60	53,30
Prob > chi ²		0,00	0,00

Tanda a, b, c menunjukkan signifikansi masing-masing pada tingkat 1%, 5%, dan 10%. Pada kolom 1, rapat diukur dengan merujuk pada jumlah rapat sedangkan pada kolom 2 rapat mengacu pada tingkat partisipasi anggota komite audit. Penjelasan mengenai simbol variabel disajikan pada Appendix.

Pada kolom 1, pengaruh frekuensi rapat terhadap akrual negatif dapat diabaikan karena mempunyai signifikansi yang setara dengan nol. Hasil yang berbeda terlihat ketika tingkat keaktifan diukur dengan menggunakan rerata prosentase kehadiran rapat yang mempengaruhi akrual negatif pada tingkat signifikansi 5%. Tanda negatif mengisyaratkan bahwa akrual negatif semakin berkurang dengan meningkatnya tingkat kehadiran rapat komite audit. Pengaruh variabel karakteristik *governance* tetap tidak signifikan sedangkan pengaruh karakteristik perusahaan berbeda-beda. Ukuran asset berpengaruh secara negatif dan mendukung pendapat yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan menentukan kekuatan monitoring eksternal oleh partisipan pasar. Tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap akrual negatif dengan arah yang berlawanan.

Hasil ini memberikan konfirmasi Tabel 5 yang memperlihatkan bahwa perusahaan yang mengalami masalah profitabilitas cenderung untuk menghindari akrual negatif dan lebih memilih memanipulasi laba akuntansi melalui akrual positif. Arus kas dari operasi secara negatif mempengaruhi akrual pada tingkat signifikansi 1%. Kemungkinan besar, hal ini dilakukan untuk menimbulkan kesan bahwa perusahaan terbebas dari masalah *free cash flow* yang merupakan sumber dari problem keagenan.

Untuk meningkatkan keyakinan atas hasil yang diperoleh, penelitian ini melakukan serangkaian uji lanjutan (hasil tidak disajikan pada paper ini). Pertama pengujian dilakukan dengan membagi jumlah rapat dan tingkat kehadiran rapat dengan log natural asset dan sekaligus menghilangkan variabel asset dari persamaan. Hasil analisa memperlihatkan pola yang sama dengan pengujian sebelumnya. Selanjutnya, *discretionary accruals* diukur dengan menggunakan pendekatan *cash flow*. Hasil pengujian juga menunjukkan pola pengaruh yang tidak berubah.

Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh tingkat keaktifan komite audit terhadap tingkat *discretionary accrual* di Indonesia. Rerangka pemikiran menggunakan teori keagenan yang memprediksi bahwa tingkat keaktifan mekanisme *governance* akan berpengaruh negatif terhadap diskresi manajemen dalam memilih metode akuntansi untuk memanipulasi laba. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan 2014. Prosedur pengambilan sampel menunjukkan bahwa masalah ketersediaan data dan kelengkapan data semakin membaik dari tahun ke tahun. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tiga ukuran variabel dependen yang mencakup akrual absolut, akrual positif, dan akrual negatif. Ukuran tingkat keaktifan komite audit adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran rapat anggota komite.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa keaktifan komite audit dengan menggunakan ukuran tingkat kehadiran rapat hanya berpengaruh terhadap akrual negatif. Pengaruh tersebut bertanda negatif yang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kehadiran rapat anggota komite dapat mengurangi akrual negatif. Analisa yang dilakukan menghasilkan temuan yang berimplikasi secara teoritis. Pertama, pengaruh keaktifan komite audit terhadap akrual mengandung sifat kontijensi terhadap indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan komite. Temuan ini mempunyai implikasi bahwa pengujian mekanisme *governance* di Indonesia perlu mendayagunakan semua indikator yang secara potensial mampu berfungsi sebagai proksi *governance*. Ke dua, pengaruh keaktifan komite audit juga memuat sifat kontijensi terhadap sampel yang digunakan dalam pengujian karena terjadi variasi perubahan tingkat kecocokan model (*fittest*) dan tingkat kekuatan model antar sampel keseluruhan dan antar sub sampel. Temuan ini meniscayakan bahwa pengujian yang terbatas pada sampel agregat dapat menyebabkan tingkat kekuatan hasil (*robustness*) menjadi meragukan.

Secara praktis temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat rapat dapat digunakan sebagai petunjuk awal tingkat manajemen laba. Perusahaan yang mempunyai komite audit dengan tingkat rapat yang rendah kemungkinan akan mempunyai tingkat diskresi akrual yang tinggi. Pada perusahaan dengan tipe seperti ini, dibutuhkan upaya penelaahan yang lebih besar dalam mengambil keputusan investasi maupun kredit.

Dalam penelitian ini, perbedaan karakteristik perusahaan tidak diakunkan secara langsung tapi hanya diperlakukan sebagai variabel control. Dengan menggunakan metode *difference-in-diffrence*, Eshleman dan Peng (2014) sampai pada kesimpulan bahwa karakteristik perusahaan mampu mengeliminasi kekuatan variabel *governance* dalam memprediksi tingkat akrual. Namun demikian, ketika penelitian ini menggunakan metode *paired-matched sample*, jumlah observasi yang tersedia tereduksi secara substansial sehingga menghalangi pengujian dengan berdasarkan sub-sampel akrual positif dan negatif.

Oleh karena itu dibutuhkan pengujian selanjutnya yang menggunakan sampel yang lebih besar agar masalah ini dapat diatasi. Selanjutnya, penelitian ini mengabaikan masalah linearitas dalam tingkat keaktifan komite audit. Walaupun teori keagenan secara implisit memprediksi hubungan negatif antara tingkat keaktifan komite dengan akrual, Adams dan Ferreira (2009) berpendapat bahwa tingkat keaktifan yang tinggi merupakan sinyal kegagalan komite audit dalam bekerja secara efisien. Pendapat ini mengisyaratkan bahwa tingkat keaktifan mempunyai titik optimal yang berimplikasi bahwa frekuensi rapat mempunyai hubungan non-linear dengan akrual. Mengingat beberapa kelemahan tersebut, maka diperlukan kecermatan dalam melakukan interpretasi atas temuan yang dihasilkan dari pengujian yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka

- Abbott, L. J., S. Parker & G. F. Peters (2004). Audit committee characteristics and restatements. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 23(1), 69-87.
- Adams, R. & D. Ferreira (2007). A theory of friendly boards. *Journal of Finance*, 62(1), 217-250.
- Adams, R., B. E. Hermalin & M. S. Weisbach (2008). *The role of boards of directors in corporate governance: a conceptual framework and survey*, National Bureau of Economic Research.
- Adams, R. B. & D. Ferreira (2012). Regulatory pressure and bank directors incentives to attend board meetings. *International Review of Finance*, 12(2), 227-248.
- Adams, R. e. B. & D. Ferreira (2008). Do Directors Perform for Pay? *Journal of Accounting and Economics*, 46(1), 154-171.
- Adams, R. e. B. & D. Ferreira (2009). Women in the Boardroom and Their Impact on Governance and Performance. *Journal of financial economics*, 94(2), 291-309.
- Agrawal, A. & C. R. Knoeber (1996). Firm Performance and Mechanisms to Control Agency Problems between Managers and Shareholders. *Journal of financial and quantitative analysis* 31(03): 377-397.
- Aldamen, H., Duncan, K., Kelly, S., McNamara, R., & Nagel, S. (2012). Audit committee characteristics and firm performance during the global financial crisis. *Accounting & Finance*, 52(4), 971-1000.
- Anderson, R. C., S. A. Mansi & D. M. Reeb (2004). Board characteristics, accounting report integrity, and the cost of debt. *Journal of accounting and economics*, 37(3), 315-342.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1-17.

- Barua, A., D. V. Rama & V. Sharma (2010). Audit committee characteristics and investment in internal auditing. *Journal of Accounting and Public Policy*, 29(5): 503-513.
- Basil, A. N. (2012). The determinants of board meetings: evidence from categorical analysis. *Journal of Applied Accounting Research*, 13(2): 178-190.
- Black, B. S., A. G. d. Carvalho & É. Gorga (2012). What matters and for which firms for corporate governance in emerging markets? evidence from Brazil (and Other Brik Countries). *Journal of Corporate Finance*, 18(4), 934-952.
- Carver, B. T. (2014). The retention of directors on the audit committee following an accounting restatement. *Journal of Accounting and Public Policy*, 33(1), 51-68.
- Chen, K. C. W., Z. Chen and K. C. J. Wei (2009). Legal protection of investors, corporate governance, and the cost of equity capital. *Journal of Corporate Finance*, 15(3), 273-289.
- Chen, K. Y. & J. Zhou (2007). Audit committee, board characteristics, and auditor switch decisions by Andersen's Clients*. *Contemporary Accounting Research*, 24(4), 1085-1117.
- Chou, H.-I., H. Chung & X. Yin (2013). Attendance of board meetings and company performance: evidence from Taiwan. *Journal of Banking & Finance*, 37(11), 4157-4171.
- Dalton, D., Daily, C., Ellstrand, A., & Johnson, J. (1998). Meta-Analytic reviews of board composition, leadership structure, and financial performance. *Strategic Management Journal*, 19(3), 269-290.
- Dalton, D., Daily, C., Johnson, J., & Ellstrand, A. (1999). Number of directors and financial performance: a meta-analysis. *Academy of Management Journal*, 42(6), 674-686.
- DeZoort, F. T., Hermanson, D. R., Archambeault, D. S., & Reed, S. A. (2002). Audit committee effectiveness: A synthesis of the empirical audit committee literature. *Journal of accounting literature*, 21, 38.
- Eshleman, J. D., & G. Peng (2014). Do big 4 auditors provide higher audit quality after controlling for the endogenous choice of auditor? *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 33(4), 197-219.
- Feng, Y., Simon, G., Wanli, L., & Huaili, L. (2012). Determinants of audit committee meeting frequency: evidence from Chinese listed companies. *Managerial Auditing Journal*, 27(4), 425-444. doi:10.1108/02686901211218003
- Francis, B., Hasan, I., Song, L., & Waisman, M. (2013). Corporate governance and investment-cash flow sensitivity: Evidence from emerging markets. *Emerging Markets Review*, 15, 57-71.
- García, L. S., E. R. Barbadillo & M. O. Pérez (2012). Audit committee and internal audit and the quality of earnings: empirical evidence from spanish companies. *Journal of Management & Governance*, 16(2), 305-331.
- Ghafran, C. & N. O'Sullivan (2013). The governance role of audit committees: reviewing a decade of evidence. *International Journal of Management Reviews*, 15(4), 381-407.
- Giulio, G. (2011). Determinants of board and audit committee meeting frequency: evidence from Italian companies. *Managerial Auditing Journal*, 26(3), 208-229.
- Goh, B. W. (2009). Audit committees, boards of directors, and remediation of material weaknesses in internal control*. *Contemporary Accounting Research*, 26(2), 549-579.
- González, J. S. & E. García-Meca (2014). Does corporate governance influence earnings management in Latin American Markets?. *Journal of Business Ethics*, 121(3), 419-440.
- Habbash, M., C. Sindezingue & A. Salama (2013). The effect of audit committee characteristics on earnings management: evidence from the United Kingdom. *International Journal of Disclosure and Governance*, 10(1), 13-38.

- Hoque, M. Z., M. D. R. Islam & M. N. Azam (2013). Board committee meetings and firm financial performance: an investigation of Australian Companies. *International Review of Finance*, 13(4), 503-528.
- Hribar, P. & D. Collins (2002). Errors in estimating accruals: implications for empirical research. *Journal of Accounting Research*, 40(1), 105-134.
- Jiraporn, P., M. Singh & C. I. Lee (2009). Ineffective corporate governance: director busyness and board committee memberships. *Journal of Banking & Finance*, 33(5), 819-828.
- Keune, M. B. & K. M. Johnstone (2012). Materiality judgments and the resolution of detected misstatements: the role of managers, auditors, and audit committees. *The Accounting Review*, 87(5), 1641-1677.
- Klein, A. (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. *Journal of accounting and economics*, 33(3), 375-400.
- Leuz, C., D. Nanda & P. D. Wysocki (2003). Earnings management and investor protection: an international comparison. *Journal of financial economics*, 69(3), 505-527.
- Lin, Y.-f., Y. M. C. Yeh & F.-m. Yang (2014). Supervisory quality of board and firm performance: a perspective of board meeting attendance. *Total Quality Management & Business Excellence*, 25(3-4), 264-279.
- Maug, E. (1998). Large shareholders as monitors: is there a trade-off between liquidity and control? *The Journal of Finance*, 53(1), 65-98.
- Méndez, C. F. & R. A. García (2007). The Effects of ownership structure and board composition on the audit committee meeting frequency: Spanish Evidence. *Corporate Governance: An International Review*, 15(5), 909-922.
- Millstein, I. & P. MacAvoy (1998). The active board of directors and performance of the large publicly traded corporation. *Columbia Law Review*, 98(5), 1283-1322.
- Min, B. S. & P. Verhoeven (2013). Outsider board activity, ownership structure and firm value: evidence from Korea. *International Review of Finance*, 13(2), 187-214.
- Mohid Rahmat, M., T. Mohd Iskandar & N. Mohd Saleh (2009). Audit committee characteristics in financially distressed and non-distressed companies. *Managerial Auditing Journal*, 24(7), 624-638.
- Munisi, G. & T. Randøy (2013). Corporate governance and company performance across sub-saharan african countries. *Journal of Economics and Business*, 70, 92-110.
- Persakis, A. & G. E. Iatridis (2016). Audit quality, investor protection and earnings management during the financial crisis of 2008: An International Perspective. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 41, 73-101.
- Raghunandan, K. & D. V. Rama (2003). Audit committee composition and shareholder actions: evidence from voting on auditor ratification. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 22(2), 253-263.
- Raghunandan, K. & D. V. Rama (2007). Determinants of audit committee diligence. *Accounting Horizons*, 21(3), 265-279.
- Rhoades, D., P. Rechner & C. Sundaramurthy (2000). Board composition and financial performance: a meta-analysis of the influence of outside directors. *Journal of Managerial Issues*, 12(1), 76-91.
- Samaha, K., H. Khelif & K. Hussainey (2015). The Impact of board and audit committee characteristics on voluntary disclosure: a meta-analysis. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 24, 13-28.
- Schwartz-Ziv, M. & M. S. Weisbach (2013). What do boards really do? evidence from minutes of board meetings. *Journal of Financial Economics*, 108(2), 349-366.

- Stewart, J. & L. Munro (2007). The impact of audit committee existence and audit committee meeting frequency on the external audit: perceptions of Australian auditors. *International Journal of Auditing*, 11(1), 51-69.
- Sultana, N. (2015). Audit committee characteristics and accounting conservatism. *International Journal of Auditing*.
- Vafeas, N. & J. F. Waagelein (2007). The Association between audit committees, compensation incentives, and corporate audit fees. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 28(3), 241-255.
- Xie, B., W. N. Davidson & P. J. DaDalt (2003). Earnings Management and corporate governance: the role of the board and the audit committee. *Journal of Corporate Finance*, 9(3), 295-316.
- Zhang, Y., J. Zhou & N. Zhou (2007). Audit committee quality, auditor independence, and internal control weaknesses. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(3), 300-327.